

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kualitas Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif pemerintah daerah

N		PD	BD	JAD	JP	LEV	IFR
	Valid		405	405	405	405	405
Missing		0	0	0	0	0	0
Mean		119323445 3787	115624619 9059	32,8	357924,511 1111	0,188910357 1286	0,051851851 85185
Median		102869794 3281	967245794 229	30	258003	0,011532484	0
Std. Deviation		595262375 181,4	619870590 993,4	9,02181075 5438	334472,291 3199	1,022814338 968	0,222002091 1903
Minimum		392055540 089	292929354 805	20	33215	1,64247e- 005	0
Maximum		440906548 2201	454612997 1366	50	2247425	13,25576815	1

Tabel 4.2 menunjukkan statistik deskriptif masing-masing variabel pada table 4.2 jumlah data pada setiap variabel yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 405 sampel pemerintah daerah. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menunjukkan nilai *minimum* pada variabel pendapatan daerah sebesar 392055540089, dan nilai *maximum* sebesar 4409065482201. Nilai rata-rata (*mean*) variabel pendapatan daerah sebesar 1193234453787, dan memiliki nilai median sebesar 1028697943281 dengan nilai *standard deviation* sebesar 595262375181,4. Variabel pendapatan daerah memiliki nilai *mean* yang lebih

tinggi dibandingkan dengan nilai median sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan daerah di pulau Sumatra memiliki pendapatan daerah yang tinggi.

Variabel belanja daerah menunjukkan nilai *minimum* sebesar 292929354805, dan nilai *maximum* sebesar 4546129971366. Nilai rata-rata (*mean*) variabel belanja daerah sebesar 1156246199059, dan memiliki nilai median sebesar 967245794229 dengan nilai *standard deviation* sebesar 619870590993,4. Variabel belanja daerah memiliki nilai *mean* yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai median sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata belanja daerah di pulau Sumatra memiliki belanja daerah yang tinggi.

Variabel jumlah anggota DPRD menunjukkan nilai *minimum* sebesar 20, dan nilai *maximum* sebesar 50. Nilai rata-rata (*mean*) variabel jumlah anggota DPRD sebesar 32,8, dan memiliki nilai median sebesar 30 dengan nilai *standard deviation* sebesar 619870590993,4. Variabel jumlah anggota DPRD memiliki nilai *mean* yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai median sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah anggota DPRD di pulau Sumatra tinggi.

Variabel jumlah penduduk menunjukkan nilai *minimum* sebesar 33215, dan nilai *maximum* sebesar 2247425. Nilai rata-rata (*mean*) variabel jumlah penduduk sebesar 357924,5111111, dan memiliki nilai median sebesar 258003 dengan nilai *standard deviation* sebesar 334472,2913199. Variabel jumlah penduduk memiliki nilai *mean* yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai median sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah penduduk di pulau Sumatra tinggi.

Variabel rasio pembiayaan hutang (*leverage*) menunjukkan nilai *minimum* sebesar 33215 , dan nilai *maximum* sebesar 2247425. Nilai rata-rata (*mean*) variabel jumlah penduduk sebesar 357924,51111111, dan memiliki nilai median sebesar 258003 dengan nilai *standard deviation* sebesar 334472,2913199. Variabel jumlah penduduk memiliki nilai *mean* yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai median sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah penduduk di pulau Sumatra tinggi.

2. Pengujian Model Fit (*Overall Model Fit*)

Tabel 4.3
Perbandingan Nilai -2LL Awal dengan -2LL Akhir

-2 Log likelihood	Nilai
	Pemerintah daerah tingkat II
Awal (Block Number : 0)	165,185
Akhir (Block Number : 1)	133,304

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 15, 2018

Tabel 4.3 menunjukkan nilai -2LL awal (*block number* = 0) dengan nilai -2LL akhir (*block number* = 1) pemerintah daerah tingkat II. Pemerintah daerah tingkat II memiliki nilai -2LL awal (*block number* = 0) sebesar 165,185 dan nilai -2LL akhir (*block number* = 0) sebesar 133,304. Didalam pengujian ini terdapat selisih penurunan sebesar 31,881 yang dapat diartikan bahwa model yang diuji fit dengan data.

3. Uji Kelayakan Model

Tabel 4.4
Menilai *Overall Model Fit*

Sampel		Chi-Square	df	Sig.	Keterangan
Pemerintah daerah tingkat II	Step	31,881	5	0,000	Layak
	Block	31,881	5	0,000	
	Model	31,881	5	0,000	

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 15, 2018

Tabel 4.4 menunjukkan hasil pengujian kelayakan model pemerintah daerah tingkat II menggunakan *Omnibus Test of Model Coefficient*. Berdasarkan hasil pengujian *Omnibus Test of Model Coefficient* dapat terlihat pemerintah daerah tingkat II memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah tingkat II memiliki data penelitian yang layak untuk diteliti.

Tabel 4.5
Hasil Uji Kelayakan Model

Sampel	Chi-square	Sig.	Keterangan
Pemerintah daerah tingkat II	12,346	0,136	Layak

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 15, 2018

Tabel 4.5 menunjukkan hasil *Hosmer and Lameshow Test* yang digunakan untuk menguji kelayakan model penelitian yang digunakan dengan melihat hasil dari nilai *Chi-square* dan nilai signifikansi. Pemerintah daerah tingkat II yang memiliki nilai *Chi-square* sebesar 12,346 dan nilai signifikansi sebesar $0,136 > \alpha 0,05$. Berdasarkan hasil yang ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa

pemerintah daerah tingkat II memiliki model yang layak digunakan untuk melakukan pengujian dalam penelitian ini.

4. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Pemerintah daerah tingkat II			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	133,304	0,076	0,226

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 15, 2018

Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen untuk data pemerintah daerah tingkat II. Nilai *Nagelkerke R Square* adalah modifikasi dari koefisien *Cox & Snell R Square* yang digunakan untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi antara 0 sampai 1.

Berdasarkan Tabel 4.6 pemerintah daerah tingkat II memiliki nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,226 yang artinya 22,6% keputusan pelaporan keuangan di internet dijelaskan pada variabel pendapatan daerah, belanja daerah, jumlah anggota DPRD, jumlah anggota penduduk, dan rasio pembiayaan hutang (*leverage*). Sedangkan 77,4% pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah tingkat II dijelaskan pada variabel lain.

5. Tabel Klasifikasi

Matriks klasifikasi dapat digunakan untuk memperjelas ketepatan model atau penggambaran model regresi logistic dengan data penelitian yang memperlihatkan hasil prediksi dengan hasil penelitian. Hasil klasifikasi

menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi adanya kemungkinan pendapatan daerah, belanja daerah, jumlah anggota DPRD, jumlah penduduk dengan keputusan pelaporan keuangan di internet. Tabel klasifikasi ini dapat dilihat di tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Tabel klasifikasi pemerintah daerah

Observed			Predicted		
			IFR		Percentage Correct
			Tidak melaporkan	Melaporkan	
Step 1	IFR	Tidak melaporkan	383	1	99,7
		Melaporkan	20	1	4,8
	Overall Percentage				94,8

a. The cut value is ,500

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 15, 2018

Berdasarkan table 4.7, menunjukkan bahwa dari 384 pemerintah daerah tingkat II yang tidak melaporkan, seharusnya 99,7% dapat diprediksi oleh model regresi logistik dengan tepat. Sedangkan dari 21 pemerintah daerah tingkat II yang melaporkan 4,8% yang mapu di prediksi dengan tepat oleh model regresi logistik. Secara keseluruhan terdapat 94,8% yang dapat di prediksi dengan tepat oleh model regresi dalam penelitian ini.

B. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik dengan menggunakan program SPSS *for window version 15*. Hasil regresi logistik dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Logistik Pemerintah daerah

		B	S.E	Wald	df	Sig.	Exp (B)
Step 1 ^a	LEV	,157	,118	1,765	1	0,184	1,170
	LN_PD	9,191	2,149	18,825	1	0,000	9807,327
	LN_BD	6,7974	1,912	12,634	1	0,000	0,001
	LN_JAD	4,990	2,554	3,816	1	0,041	146,922
	LN_JP	-3,349	,962	12,114	1	0,001	0,0350
	constant	-45,671	24,738	3,408	1	0,065	0,000

Variable(s) entered on step 1: LEV, LN_PD, LN_BD, LN_JAD, LN_JP.

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 15, 2018

Berdasarkan Tabel 4.8 maka regresi logistik yang diperoleh sebagai berikut:

$$\text{IFR} = -45,671 + 9,191\text{PD} + 6,7974\text{BD} + 4,990\text{JD} - 3,349\text{JP} - 0,157\text{LEV}$$

1. Hasil pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh hasil pengujian variabel pendapatan daerah memiliki nilai sig sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ dan arah koefisien positif 9,191, artinya variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet, sehingga H_1 menyatakan bahwa variabel pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet dapat diterima.

2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh hasil pengujian variabel belanja daerah yang memiliki nilai sig sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ dan arah koefisien positif 6,7974, artinya variabel independen belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pelaporan keuangan di internet, sehingga H_2 menyatakan bahwa variabel belanja daerah berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet dapat diterima.

3. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3)

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh hasil pengujian variabel jumlah anggota DPRD yang memiliki nilai sig sebesar $0,041 < \alpha 0,05$ dan arah koefisien positif 4,990, artinya variabel independen jumlah anggota DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet, sehingga H_3 menyatakan bahwa variabel jumlah anggota DPRD berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet dapat diterima.

4. Hasil Pengujian Hipotesis Keempat (H_4)

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh hasil pengujian variabel jumlah penduduk yang memiliki nilai sig sebesar $0,001 < \alpha 0,05$ dan arah koefisien negatif -3349, artinya variabel independen jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan di internet. sehingga H_4 menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet ditolak.

5. Hasil Pengujian Hipotesis Kelima (H_5)

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh hasil pengujian variabel rasio pembiayaan hutang (*leverage*) yang memiliki nilai sig sebesar $0,184 > \alpha 0,05$ dan arah koefisien positif 0,157, artinya variabel independen rasio pembiayaan hutang (*leverage*) tidak

berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet, sehingga H₅ menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet ditolak

C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari pendapatan daerah, belanja daerah, jumlah anggota DPRD, jumlah penduduk, dan rasio pembiayaan hutang (*leverage*) terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah tingkat II di Pulau Sumatra pada periode tahun 2015-2017. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terdapat 2 variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah yaitu variabel jumlah penduduk dan variabel rasio pembiayaan hutang (*leverage*).

1. Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pelaporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah daerah tingkat II di Pulau Sumatra

Hasil pengujian H₁ menunjukkan bahwa variabel pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah tingkat II di Pulau Sumatra. Hasil pengujian ini juga menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang tinggi mendorong pemerintah untuk dapat mempublikasikan laporan keuangannya agar tercipta badan publik yang bersifat transparan.

Pemerintah daerah yang telah diberikan mandat oleh rakyat untuk dapat mengelola pendapatannya harusnya dapat menjalankan fungsi tersebut

dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa besaran atau kecilnya ukuran pendapatan daerah tidak mengurangi niat pemerintah daerah dalam mempublikas laporan keuangannya di internet.

Hasil pengujian ini juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jaya & Sisdyani, (2014), Verawaty, (2017). Penelitian-penelitian tersebut berhasil membuktikan bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet.

2. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pelaporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah tingkat II di Pulau Sumatra

Hipotesis kedua menguji pengaruh belanja terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah tingkat II di pulau Sumatra. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Rosita, (2017), Pratama *at al*, (2015), Alhajjriana *et al.*, (2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja daerah dapat mendorong pemerintah untuk dapat mempublikasikan laporan keuangannya melalui internet. Penelitian-penelitian tersebut berhasil membuktikan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet.

Belanja daerah yang pada dasarnya di digunakan untuk memenuhi dan menunjang pelaksanaan pemerintah memang sebaiknya dapat di publikasikan melalui *website* pemerintah daerah masing-masing. Masyarakat juga dapat melihat penegeluaran yang dilakukan pemerintah daerah sesuai atau tidak dengan

apa yang dilaporkan. Dengan begitu pemerintah daerah telah melakukan transparansi dan masyarakat juga dapat turut serta dalam pengawasan apakah pemerintah telah melaksanakan fungsinya dengan sebaik mungkin atau tidak.

3. Pengaruh Jumlah anggota DPRD terhadap Pelaporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah tingkat II di Pulau Sumatra

Hasil pengujian hipotesis H_3 menunjukkan bahwa jumlah anggota DPRD memiliki pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet. Hasil pengujian ini sesuai dengan hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPRD berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet. Hasil penelitian yang sesuai ini dilakukan oleh Setyaningrum & Syafitri, (2012), Suhardjanto & Yulianingtyas, (2011), Gilligan & Matsusaka, (2001), dan Darmastuti & Setyaningrum, (2009).

Jumlah anggota DPRD berpengaruh positif dan signifikan, artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan antara jumlah anggota DPRD dengan pelaporan keuangan di internet karena anggota DPRD memiliki wewenang sebagai pengawas, dan DPRD juga mengontrol jalannya pemerintah agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diharapkan dapat mengawasi pelaksanaan dalam menginformasikan keuangannya agar dapat terwujud sebuah badan pemerintahan yang bersifat transparan dan akuntabel.

4. Pengaruh Jumlah penduduk terhadap Pelaporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah tingkat II di Pulau Sumatra

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan di internet. Hasil dari penelitian ini tidak menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah tingkat II. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hilmi & Martani, (2012) dan Pratama *et al.*, (2015) yang menemukan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet.

Alhajjriana *et al.*, (2017) beranggapan bahwa jumlah penduduk tidak dapat mendorong pemerintah untuk mempublikasikan laporan keuangannya melalui internet. Jumlah penduduk berpengaruh negatif dikarenakan mungkin masih banyaknya pelayanan publik yang belum dirasakan oleh masyarakat dan masih kurangnya rasa tanggung jawab oleh masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah. Masyarakat harusnya dapat lebih sadar bahwa dengan ikut mengawasi kinerja pemerintah membuat pemerintah daerah dapat memaksimalkan kinerjanya. jumlah penduduk yang besar juga harusnya dapat mendorong pemerintah untuk dapat mempublikasikan laporannya, dikarenakan pemerintah daerah tidak mungkin dapat mengeluarkan dana yang besar hanya untuk pemenuhan kebutuhan informasi publik jika bisa menggunakan *website* di masing-masing daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alhajjriana *et al.*, (2017) yang tidak berhasil membuktikan pengaruh dari jumlah penduduk terhadap pelaporan keuangan di internet.

5. Pengaruh Rasio pembiayaan hutang (*leverage*) terhadap Pelaporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah tingkat II di Pulau Sumatra

Hipotesis kelima menguji pengaruh rasio pembiayaan hutang (*leverage*) terhadap pelaporan keuangan di internet. Hasil dari penelitian ini tidak menunjukkan adanya pengaruh dari rasio pembiayaan hutang (*leverage*) terhadap pelaporan keuangan di internet. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi, (2010) yang menemukan bahwa rasio pembiayaan hutang berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet.

Hutang bukan menjadi komponen pendanaan utama dalam kegiatan operasi pemerintah daerah sehingga rasio pembiayaan hutang (*leverage*) tidak diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan di internet Mahmud & Hudoyo, (2014) dan Nosihana & Yaya, (2016) beranggapan bahwa pemerintah daerah yang memiliki rasio pembiayaan hutang yang tinggi cenderung untuk tidak melaporkan laporan keuangannya di internet sedangkan pemerintah daerah yang memiliki rasio pembiayaan hutang yang rendahlah yang cenderung melaporkan laporan keuangan di internet.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih belum terbuka tentang laporan keuangannya terhadap kreditur. Pelaporan keuangan di internet adalah

cara yang baik dalam mendapatkan dana dari kreditur, namun pemerintah masih jarang yang melakukan pelaporan keuangan di internet walaupun pemerintah daerah tersebut telah mendapat predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nosihana & Yaya, (2016), Mahmud & Hudoyo, (2014), Laswad *et al.*, (2005), dan Arifin & Rosita, (2017).